BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi produktivitas, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai menjadi tantangan utama, terutama bagi keluarga yang berstatus ekonomi rendah. Menurut (Darmawan dan Sjaaf, 2016), pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh negara untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam konteks ini menjelaskan pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia kepemilikan jaminan kesehatan telah menjadi isu yang penting, terutama karena akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Pada awal tahun 2014, pemerintah Indonesia melalui kementrian kesehatan mulai mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diatur dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Kemenkes, 2016).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan adalah tingkat pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi suatu bangsa karena berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dengan pendidikan yang baik, setiap individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu kelangsungan hidupnya di masa depan. Menurut Schultz (1960), dapat diperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan, kemampuan produksi, dan menghasilkan pendapatan dari tenaga kerja. Tingkat pendidikan yang tinggi diyakini mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya jaminan kesehatan, serta dapat mendorong partisipasi aktif dalam program kesehatan nasional.

Pendapatan yang diperoleh oleh setiap masyarakat juga berpengaruh langsung terhadap daya beli dan konsumsi yang mana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghasilan yang layak. Ketika setiap masyarakat memiliki pendapatan yang memadai mereka

dapat lebih mampu berinvestasi dalam kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas. Menurut (Soekartawi 2012), pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian.

Masalah pendapatan sering kali berkaitan dengan status pekerjaan. Karyawan yang memiliki pekerjaan tetap atau formal cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap jaminan kesehatan dibandingkan dengan pekerja tidak tetap atau yang bekerja disektor informal. Akses terhadap jaminan kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berfungsi secara optimal sebagai tenaga kerja. Tanpa dukungan kesehatan yang memadai, risiko penurunan produktivitas dan kualitas hidup akan meningkat hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketersediaan dan akses terhadap jaminan kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan angka harapan hidup. Dengan adanya kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat memiliki perlindungan finansial dan akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran kesehatan masyarakat. AHH menunjukkan perkiraan rata-rata umur yang diharapkan seseorang bisa hidup dari saat lahir apabila mengikuti tingkat kesehatan dan

kondisi layanan kesehatan saat ini di suatu wilayah. Di bawah ini merupakan gambar dari tingkat angka harapan hidup berdasarkan genderr di Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Angka Harapan Hidup di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 sebelum diberlakukannya program JKN pada tahun 2010-2013 terdapat peningkatan yang konsisten dalam angka harapan hidup untuk gender laki-laki dan perempuan, meskipun laju pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Terdapat perbedaan antara angka harapan hidup antara masyarakat laki-laki dan perempuan dapat dilihat, dengan masyarakat yang berjenis kelamin perempuan memiliki angka yang lebih tinggi. Setelah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 angka harapan hidup masyarakat laki-laki meningkat menjadi 68,87 tahun sedangkan masyarakat perempuan yaitu 72,59 tahun.

Pada tahun 2015-2024 terjadi peningkatan yang lebih signifikan untuk kedua gender. Angka harapan hidup masyarakat laki-laki mencapai 74,21 tahun pada

tahun 2024, sementara angka harapan hidup masyarakat perempuan mencapi 74,18 tahun. Hal ini dapat dilihat bahwa setelah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional peningkatan angka harapan hidup di Indonesia menjadi lebih cepat untuk kedua gender. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga tampaknya berkontribusi pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, yang berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan angka harapan hidup pada sebelum diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional cenderung lebih lambat dan stabil, adapun setelah diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional memiliki pertumbuhan yang lebih cepat hal ini menunjukan dampak positif program Jaminan Kesehata Nasioal terhadap kesehatan masyarakat.

Di Indonesia peluncuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh Masyarakat, terutama untuk keluarga yang tidak mampu. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirancang untuk memastikan bahwa adanya akses layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat berstatus ekonomi rendah melalui subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Badan pusat statistik (BPS) merilis data masyarakat di Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan menurut karakteristik jenis kelamin.

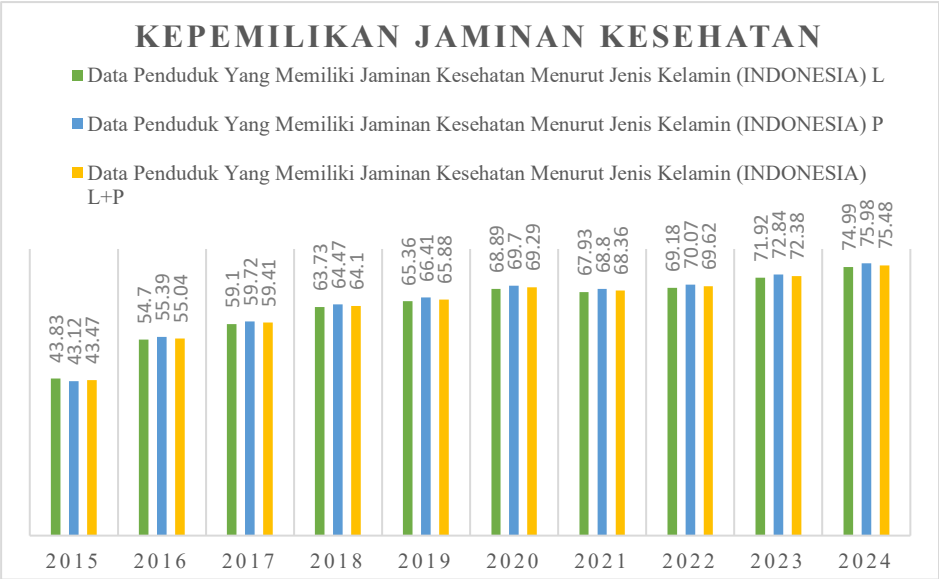

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang konsisten pada jumlah kepemilikan jaminan kesehatan berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2015 angka kepemilikan jaminan kesehatan masih relatif rendah seperti, persentase individu laki-laki yang memiliki jaminan kesehatan adalah 43,83%, sedangkan persentase perempuan yang memiliki jaminan kesehatan adalah 43,12%, pada hal ini tahun 2015 jumlah kepemilikan perempuan menunjukan jumlah yang sedikit rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun-tahun berikutnya terdapat peningkatan angka kepemilikan jaminan kesehatan individu perempuan, seperti pada tahun 2024, persentase individu laki-laki yang memiliki jaminan kesehatan adalah 74,99%, sedangkan individu Perempuan yang memilki jaminan kesehatan adalah 75,98%, hal ini dapat memperlihatkan bahwa adanya kesadaran yang lebih besar tentang

pentingnya jaminan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Keluarga dengan status ekonomi rendah seringkali menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Observasi di berbagai negara menunjukan bahwa kondisi kesehatan keluarga miskin cenderung lebih buruk dibandingkan dengan keluarga yang memiliki status ekonomi yang lebih baik (Fletcher & wolfe, 2014; Milss, 2014; elgar *et al*., 2015; Carrieri & Jones, 2017; Linden & Ray, 2017). Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor seperti lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, dan jenis pekerjaan berkontribusi pada kesehatan yang buruk ini. Tetapi, proses identifikasi keluarga tidak mampu berdasarkan konsumsi sering kali tidak akurat. Banyak keluarga yang sebenarnya berpenghasilan rendah tetapi terdaftar sebagai keluarga mampu karena mereka menerima bantuan sosial atau subsidi yang membiayai konsumsi mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi dalam program jaminan kesehatan.

Seluruh masyarakat Indonesia memilki peran penting dalam mempengaruhi masa depan negara, pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat krusial dalam menentukan kualitas hidup dan produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai menjadi sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keluarga yang memiliki jaminan kesehatan cenderung lebih sering menggunakan layanan kesehatan dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat yang memerlukan perawatan

kesehatan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Meskipun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah memberikan manfaat bagi banyak keluarga, tetapi masih ada kesenjangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Beberapa kelompok masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai karenanya hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berupaya untuk menggunakan penghasilan dari pekerjaan sebagai alternatif untuk menentukan status ekonomi keluarga, dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan dan akses bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Oleh karena itu, sangat diperlukannya evaluasi bagaimana tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga berhubungan dengan kepemilikan jaminan kesehatan. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang memiliki status keluarga berekonomi rendah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan efektif. Oleh karena itu, judul yang akan diteliti peneliti pada penelitian ini adalah **"ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN, JENIS PEKERJAAN, DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA TERHADAP KEPEMILIKAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dari kepemilikan jaminan Kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga di Indonesia selama kurun waktu tahun 2010-2024?
2. Bagaimana hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik antara variabel kepemilikan jaminan kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga di Indonesia selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2024.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kepemilikan jaminan kesehatan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan

kontribusi terhadap pihak terkait. Adapun manfaat penelitian yang terbagi ke dalam manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menganalisis hubungan antara pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pengeluaran rumah tangga, dan kepemilikan jaminan kesehatan penelitian ini dapat menambahkan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Temuan dari penelitian ini dapat memperlihatkan bagaimana peningkatan pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, pengeluaran rumah tangga berkontribusi terhadap jaminan kesehatan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman teoritis tentang pentingnya kebijakan publik yang inklusif dalam menigkatkan pendidikan dan pendapatan tenaga kerja sebagai saran untuk memperbaiki akses jaminan kesehatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini adapun beberapa manfaat praktis yang memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Dengan fokus pada pendidikan, pendapatan, dan akses jaminan kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat mengarah pada implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Berikut merupakan beberapa manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan.

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pendapatan dalam menentukan akses pada jaminan kesehatan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk merancang intervensi berbasis komunitas yang mendukung peningkatan pendapatan dan kesehatan dan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

3. Bagi Mahasiswa/I

Mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Pengetahuan ini penting untuk pengembangan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akses jaminan kesehatan, Mahasiswa/I dapat lebih siap untuk terjun ke pasar kerja dan memahami pentingnya kontribusi mereka dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini dapat menjadi tantangan serta ilmu pengetahuan baru bagi penulis. Diharapkan penulis dapat mengasah keterampilan analisis,

penulisan, dan presentasi yang berguna dalam pengembangan karier di bidang akademik atau penelitian.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini data yang digunakan diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), program survei ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Susenas merupakan salah satu sumber data resmi yang komprehensif dan terpercaya, yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi masyarakat di Indonesia. Variabel yang diteliti dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikan dengan rata-rata lama sekolah. Tingkat pendapatan diukur berdasarkan pendapatan per kapita yaitu ukuran dalam menghitung rata-rata pendapatan yang diterima oleh seorang individu dalam suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Kepemilikan jaminan kesehatan mencakup pada persentase seberapa banyak masyarakat Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan. Penelitian ini mempertimbangkan faktor kontrol seperti jenis pekerjaan dan status keluarga berekonomi rendah yang datanya yaitu pengeluaran rumah tangga.